

**ABSTRAK**

Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Apakah perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan telah dipenuhi dalam putusan Nomor 971/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 295/ Pid.B / 2013 / PN-TTD, Apakah ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah *politik criminal* dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 295/Pid.B/2013/PN.TTD, menurut penulis Majelis Hakim tidak benar-benar memberikan perhatian terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kedua undang-undang yang didakwakan, sebenarnya sudah memberikan sanksi yang sangat tegas dan jelas bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sudah diatur sanksi yang sangat berat bagi pelaku kekerasan terhadap anggota keluarga. Tetapi yang sangat disayangkan adalah mengenai penerapannya oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak. Perlu dipertanyakan, dimanakah bentuk perhatian majelis hakim terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan orang tuanya sendiri. Dalam kasus diatas majelis hakim yang memberikan putusan yang sangat rendah dari ancaman pidananya. Hakim hanya menjatuhkan pidana selama 5 bulan terhadap terdakwa, padahal seperti kita ketahui ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga adalah 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 971/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim Berdasarkan analisa penulis, kesimpulan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah tepat. Menurut penulis, terdakwa bisa dijerat dengan pasal tersebut, karena unsur-unsur dari pasal tersebut bisa terpenuhi dan mengenai hukumannya agar lebih berat lagi dari yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Kekerasan Pada Anak.

**ABSTRACT**

In this thesis, the study is a normative juridical (legal research), using the approach of the problem approach law (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach), and the approach of the case (case approach). Problems in this thesis are: Is the protection of children victims of criminal acts of violence have been met in decision No. 971 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Tim and Tebing Tinggi District Court's Decision No. 295 / Pid.B / 2013 / PN-TTD, Is the ratio decidendi of judges in deciding the case the crime of physical violence against children.

Policy crime prevention or commonly referred to as political criminals may include the scope of which is quite spacious. According to Peter G. Hoefnagels crime prevention efforts can be traveled with the adoption of criminal law (criminal law application), without criminal prevention (prevention without punishment), Influencing public views on crime and punishment through mass media (Influencing views of society on crime and punishment / mass media).

Analysis of authors to Tebing Tinggi District Court No. 295 / Pid.B / 2013 / PN.TTD, according to the author of the judges did not really give attention to children as victims of crime. In both laws were indicted, actually give sanctions a very firm and clear to the perpetrators of violence against children. In Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, is set very heavy penalties for perpetrators of violence against family members. But what is unfortunate is the application by the judge in the verdict against perpetrators of child abuse. Unquestionable, where attention form the panel of judges on children as victims of violence dilakukan own parents. In the above cases the judges to make a decision very low from criminal threat. Judges just convict for 5 months against the defendant, but as we all know the threat of punishment for someone who did physical violence against family members is five years in prison or a fine of Rp. 15,000,000 (fifteen million).

Meanwhile, against the decision of the East Jakarta District Court Decision Number. 971 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Tim Based on the analysis of the author, the conclusion given by the judges who considered that the defendant did not meet the elements of Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 on Domestic Violence is not right. According to the authors, the accused can be prosecuted under the article, because the elements of the article can be met and the penalties to be more severe than that imposed by the judges.

**Keywords:** Consideration Of the Judge, Violence on Child.